



## Pastikan Lokasi TPS untuk Disabilitas Mental

**JOGJA** - Di Kota Jogja terdapat 931 pemilih berkategori penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pada coblosan 14 Februari nanti, mereka tidak perlu diberikan pendampingan jika memenuhi beberapa syarat.

"Kalau pemilih (ODGJ) pada hari pemungutan suara terpan-tau dalam keadaan sehat, tidak sedang terganggu jiwanya, dan bisa berpikir baik, maka tidak diperlukan pendamping," ujar Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja Siti Nurhayati kemarin (16/1).

Ia menilai DPT dengan kriteria ODGJ atau disabilitas mental hak pilihnya tetap dilindungi undang-undang. Perhatian khusus kepadanya perlu diperhatikan saat pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Maka dalam hal ini KPU perlu memastikan pemetaan pemilih disabilitas secara umum. Secara khusus bagi disabilitas mental perlu memperhatikan apakah kesehatan mental pemilih dalam kondisi sehat/tidak sedang terganggu jiwanya," tuturnya.

Setelah melakukan pemetaan, fokus KPU selanjutnya memastikan lokasi TPS bagi DPT kategori disabilitas mental. Hal itu untuk melakukan monitoring lebih pada pemilih tersebut sehingga penanganannya tepat.

"Bila sedang tidak sehat, maka KPU dan jajarannya perlu berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait hak pilihnya,"

tandasnya.

Selain itu, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebelum bertugas di TPS harus diberikan pemahaman perihal fasilitasi dan pengamanan terhadap pemilih disabilitas umum dan disabilitas mental. Hal itu mengantisipasi jika dalam pelaksanaan pemungutan suara ada pemilih dalam keadaan tidak sehat.

"Karena fasilitasi yang dibutuhkan pemilih tidak hanya pada pemenuhan template surat suara bagi pemilih disabilitas sensorik netra, tapi juga perlu fasilitasi layanan komunikasi yang baik bagi disabilitas sensorik lainnya," bebernya. Kemudian juga perlu perhatian khusus untuk pembuatan TPS akses bagi pemilih disabilitas fisik.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Jogja Noor Harsya Aryo Samudro menambahkan, pihaknya memiliki komitmen dan konsisten melakukan pelayanan dan pendampingan para pemilih difabel. Hal itu dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan komunitas difabel di untuk mendapatkan akses informasi.

"Beberapa minggu ke depan ini kami akan bekerjasama dengan elemen masyarakat sipil untuk mengampanyekan pemilu yang inklusi," tandasnya.

Pada tahapan sosialisasi pemungutan suara dalam kegiatan simulasi pungut hitung, KPU Kota Jogja melibatkan tokoh difabel. Selain itu, pemenuhan hak disabilitas terutama hak akses informasi menjadi perhatian khusus yang disampaikan kepada PPK dan PPS. (cr5/laz/by)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005